

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA NGLANGGERAN, KABUPATEN GUNUNG KIDUL

*Community Empowerment Strategy in Development of Nglanggeran Tourism Village,
Gunung Kidul Regency*

Dinar Wahyuni

dinar.wahyuni@dpr.go.id
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta

Naskah Diterima: 28 Februari 2017 | Naskah direvisi: 2 Mei 2018 | Naskah diterbitkan: 30 Juni 2018

Abstract: *Currently, tourism is growing rapidly. The problem is the progress of a tourist area has not guaranteed an increase in the welfare of local community due to the low community participation in tourism management. Based on result of a research, this writing would like to study community empowerment strategy in development of Nglanggeran Tourism Village, Gunung Kidul Regency. Through qualitative descriptive approach, it can be seen that community empowerment in Nglanggeran Tourism Village is done through three strategies, awareness, capacity building, and empowerment. Awareness is done through socialization and innovation by the youth organization until finally Nglanggeran is defined as a tourist village. Community capacity building is done through training and mentoring around tourism village management. Society then put together in on organization of Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. The Statute and Bylaws are based on deliberation as a form of value system capitation. The empowerment stage is given to people who have the capacity for independence. Nglanggeran village get a lot of support for the development of tourism support facilities and tourism business development from various parties. Community empowerment strategy succeeded in improving the local community's economy. In addition, the increasing number of tourists each year has increased local revenue of Gunung Kidul Regency through ticket charges.*

Keywords: *empowerment strategy, tourism village, Nglanggeran*

Abstrak: Saat ini pariwisata berkembang pesat. Permasalahannya, kemajuan sebuah daerah wisata belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Tulisan ini merupakan hasil penelitian, ingin mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi oleh karang taruna desa sampai akhirnya Nglanggeran disepakati sebagai desa wisata. Pengkapasitasan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan seputar manajemen desa wisata. Masyarakat kemudian disatukan dalam wadah organisasi, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. Pokdarwis menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan musyawarah sebagai bentuk pengkapasitasan sistem nilai. Tahap pendayaan diberikan kepada masyarakat yang telah mempunyai kapasitas

sehingga tercapai kemandirian. Desa Nglanggeran banyak mendapat bantuan untuk pembangunan sarana pendukung wisata maupun pengembangan usaha wisata dari berbagai pihak. Strategi pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya telah meningkatkan PAD Gunung Kidul melalui retribusi tiket.

Kata kunci: strategi pemberdayaan, desa wisata, Nglanggeran

Pendahuluan

Dewasa ini, pariwisata mengalami perkembangan pesat. Tahun 2015, pariwisata di Indonesia tumbuh di atas pertumbuhan pariwisata dunia yang hanya 4,4% dan pertumbuhan pariwisata kawasan ASEAN sebesar 6%.¹ Bahkan sektor ini menjadi salah satu sektor unggulan penghasil devisa dan penyerap tenaga kerja. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata dinyatakan bahwa tahun 2015 sektor pariwisata menciptakan devisa sebesar US\$11,9 miliar atau setara Rp163 triliun (meningkat 113% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai angka devisa sebesar US\$11,17 miliar) dan menyerap tenaga kerja sebesar 12,16 juta orang. Selain itu, Badan Pusat Statistik merilis angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Agustus 2016 mencapai 7,03 juta orang. Jumlah ini turun 530.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, berkurangnya angka pengangguran karena perkembangan di sektor pariwisata. Perkembangan beberapa destinasi wisata menyerap banyak tenaga kerja.²

Mengingat pentingnya peran pariwisata dalam pembangunan masyarakat, maka Pemerintah menggalakkan pariwisata di berbagai daerah sekaligus menempatkannya sebagai pendekatan pembangunan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang

Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyebutkan

¹ Tantangan Pengembangan Pariwisata, <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/02/03/01yju1-tantangan-pengembangan-pariwisata>, diakses 7 Maret 2017.

² Pengangguran Turun 530.000, Menaker: Pariwisata Serap Tenaga Kerja, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3340085/pengangguran-turun-530000-orang-menaker-pariwisata-serap-tenaga-kerja>, diakses 20 Februari 2017.

bahwa tujuan penyelenggaraan wisata adalah memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata; memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa; memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; serta mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Namun demikian, selama ini kemajuan sebuah daerah wisata belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Salah satu penyebabnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata masih rendah baik karena kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam manajemen pengembangan pariwisata maupun peran *stakeholders* lain yang mendominasi sehingga meminggirkan peran masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan konsep pembangunan pariwisata yang pada gilirannya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat lokal.

Community based tourism (CBT) muncul sebagai sebuah alternatif dari pengembangan pariwisata. Nicole Hausler (2005) mendefinisikan CBT sebagai bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pengembangan pariwisata. Fokus utama CBT menurut Pookaiyudom (1999 dalam Pookaiyudom, 2013: 2) adalah masyarakat lokal, bagaimana mendorong keterlibatan, partisipasi, dan manfaat bagi masyarakat dari kegiatan pariwisata, serta mendorong masyarakat menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pantin dan Francis (2005: 2) berpendapat bahwa CBT sebagai integrasi dan kolaborasi antara pendekatan dan alat untuk

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui *assessment*, pengembangan, dan pemasaran sumber daya alam dan budaya masyarakat. Pengembangan CBT adalah pengembangan pariwisata yang mensyaratkan adanya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi komunitas dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan (Nurhidayati dan Fandeli, 2012: 3).

Karakteristik CBT adalah proses yang dihasilkan dari keterlibatan masyarakat untuk mengembangkan produk dan jasa pariwisata atau membuat dan menerapkan strategi pariwisata (Hall, 2000; Murphy, 1985 dalam Peter A. Johnson, 2010: 2). Penerapan konsep CBT pada pengembangan pariwisata akan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Ide kegiatan muncul dari masyarakat berdasarkan kearifan lokal yang ada. Demikian juga pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif, dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, dalam CBT terkandung konsep pemberdayaan masyarakat.

Desa wisata sebagai bentuk penerapan CBT menjadi pilihan wisata di Indonesia. Kearifan lokal dan tradisi budaya masyarakat menjadi penggerak utama kegiatan desa wisata. Selain itu, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling terkait. Karena itu, keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2002).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang mengembangkan desa wisata untuk menarik wisatawan. Pada awal tahun 2016, jumlah desa wisata terdaftar di lima kabupaten/kota berjumlah 122 desa, dengan sebaran 38 desa wisata di Sleman, 14 desa wisata di Gunung Kidul, 27 desa wisata di Kota Yogyakarta, 33 desa wisata di Bantul, dan 10 desa wisata

ada di Kulon Progo.³ Tema desa-desa wisata tersebut beragam seperti desa wisata alam, kerajinan maupun budaya.

Salah satu desa wisata yang populer di Kabupaten Gunung Kidul adalah Nglanggeran. Keistimewaan Nglanggeran mengantarkan desa ini ke berbagai ajang penghargaan pariwisata. Tahun 2017, Desa Nglanggeran memperoleh penghargaan sebagai Desa Wisata Terbaik I Indonesia dan menerima penghargaan ASEAN *Community Based Tourism Award* 2017. Capaian yang diperoleh Desa Nglanggeran antara lain: mampu memberikan kontribusi kesejahteraan sosial, melibatkan kepengurusan dari masyarakat, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, mendorong terjadinya partisipasi interaktif antara masyarakat lokal dengan wisatawan, menyediakan jasa perjalanan wisata dan pramuwisata yang berkualitas. Selain itu, kualitas makanan, minuman, akomodasi dan kinerja *friendly tour operator* (FTO) ikut menunjang perolehan penghargaan tersebut.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul? Tulisan yang merupakan hasil penelitian tahun 2017 ini ingin mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian bersifat deskriptif dan dilakukan dengan pendekatan desain kualitatif. Sesuai pendekatan yang digunakan, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Observasi dilakukan selama proses pengumpulan data, sedangkan wawancara di Desa Wisata Nglanggeran mengambil informan

³ Lebih baik Pertumbuhan Desa Wisata Daripada Mal, <http://www.pikiran-rakyat.com/wisata/2016/01/04/355728/lebih-baik-pertumbuhan-desa-wisata-daripada-mal>, diakses 27 Februari 2017.

⁴ Desa Wisata Nglanggeran Terbaik ASEAN 2017, <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/21/242838401/desa-wisata-nglanggeran-terbaik-asean-2017>, diakses 27 Februari 2017.

dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Kidul, Kelompok Sadar Wisata Desa Nglanggeran, BUMDes Nglanggeran, Kepala Desa Nglanggeran, dan masyarakat Desa Nglanggeran. Dari data yang terkumpul dilakukan analisis deskriptif sehingga didapatkan gambaran strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul.

Beberapa studi terkait pemberdayaan masyarakat desa wisata telah dilakukan, di antaranya penelitian Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, dan M. Baiquni (2013: 129-139) yang mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di Jatiluwih belum melibatkan masyarakat lokal. Peranan pemerintah terlihat dominan padahal dalam acuan pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan, pemerintah hanya sebagai fasilitator dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi perannya dalam pengembangan desa wisata dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Kemudian penelitian yang dilakukan Hastuti, Suhadi Purwantara, dan Nurul Khotimah tentang model pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Lereng Merapi Kabupaten Sleman menemukan bahwa tiga wilayah lereng Merapi Kabupaten Sleman yang meliputi Desa Wisata Pentingsari, Srowolan, dan Brayut mempunyai model pengembangan desa wisata yang berbeda. Hal ini sesuai dengan kondisi dan potensi desa masing-masing. Desa Wisata Pentingsari dijadikan alternatif model pengembangan desa wisata alam karena kondisi alam yang diapit oleh Kali Pawon dan Kali Kuning

sangat cocok untuk pendakian dengan jalur menyusuri sungai, melewati hamparan sawah, naik turun tebing, dan melewati rindangnya berbagai jenis tanaman hutan, sedangkan Desa Wisata Srowolan dijadikan alternatif model pengembangan desa wisata budaya. Keberadaan Pasar Perjuangan Srowolan dan Sanggar Budaya Sayuti Melik sebagai objek wisata sejarah menjadikan peluang pengembangan desa wisata budaya. Terakhir adalah Desa Wisata Brayut yang dijadikan alternatif model pengembangan desa wisata alam dan budaya. Di desa wisata ini, wisatawan dapat belajar tentang bagaimana bertani, belajar memelihara ikan, memasak makanan tradisional, memainkan gamelan atau berlatih menari 8 dengan tarian tradisional, serta membuat kerajinan.⁵

Penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dengan menitikberatkan pada strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul.

Pemberdayaan sebagai Pendekatan

Secara umum, pemberdayaan mengandung arti proses menuju berdaya. Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menjadi berdaya. Senada dengan pengertian ini, Prijono dan Pranarka (1996: 77) menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti, yakni: *to give power or authority* dan *to give ability to or enable*. Pengertian pertama mengandung arti memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau

⁵ Hastuti, Suhadi Purwantara, dan Nurul Khotimah. “Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Lereng Merapi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Laporan Penelitian*, <http://lppm.uny.ac.id/sites/lppm.uny.ac.id/files/abstrak%20lepas%20desa%20wisata.pdf>, diakses 27 Februari 2017.

keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Ife memperkuat pengertian kedua dengan mendefinisikan pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan memengaruhi kehidupan dari masyarakatnya (Ife, 1995: 182).

Sependapat dengan Ife, Winarni (1998: 75-76) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu: pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya, dan terciptanya kemandirian. Berdasarkan pendapat tersebut, maka pemberdayaan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang tidak memiliki daya, tetapi dapat diberikan juga kepada masyarakat yang memiliki daya, namun masih terbatas untuk mencapai kemandirian. Karena itu, daya dan potensi masyarakat harus digali dan dikembangkan. Pemberdayaan dilakukan dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki kemudian berupaya untuk mengembangkannya. Namun, pemberdayaan hendaknya tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat, sebaliknya pemberdayaan harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Dengan demikian, pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai objek melainkan juga sebagai subjek.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 2) membagi tiga tahapan pemberdayaan, yaitu: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Pada tahap penyadaran, masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan diberi penyadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Dalam

penelitian ini, subjek pemberdayaan adalah masyarakat desa wisata. Masyarakat tersebut diberi pemahaman dan motivasi bahwa mereka harus berdaya dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dirinya sendiri. Dalam hal ini, orang lain hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat mencapai kemandirian. Dengan demikian dalam masyarakat akan tercipta iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi yang dimiliki masyarakat.

Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Proses ini dapat dicapai apabila masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini sering juga disebut dengan *capacity building* yang meliputi manusia, organisasi, dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia berarti memampukan masyarakat desa wisata baik secara individu maupun kelompok melalui pemberian keterampilan dan pengetahuan seputar manajemen desa wisata. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya. Sebelum diberikan peluang usaha, masyarakat dibuatkan wadah organisasi lokal. Organisasi bersifat otonom dan berpola *structure follow functions*. Sementara pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu masyarakat menyusun aturan main. Misalnya, peraturan usaha bersama, sistem dan prosedur usaha, dan sebagainya. Sistem nilai ini harus dipatuhi semua pihak terkait.

Tahap ketiga adalah pemberian daya. Pada tahap ini masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Pemberian daya disesuaikan dengan kualitas kecakapan masing-masing orang. Misalnya, pemberian kredit modal usaha kepada masyarakat di desa wisata sesuai dengan kemampuannya dalam mengelola usaha.

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan suatu proses dan tujuan. Proses berarti serangkaian tahapan untuk mendayakan kelompok masyarakat yang

tidak berdaya maupun masyarakat yang memiliki daya, namun masih terbatas untuk mencapai kemandirian. Berbeda dengan tujuan yang menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya melalui potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat.

Konsep Desa Wisata

Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Pariwisata Inti Rakyat (PIR) dalam Hadiwijoyo (2012: 68) mendefinisikan desa wisata sebagai suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman dan kebutuhan wisata lainnya. Sementara itu, Nuryanti (Wiendu, 1993 dalam Chusmeru dan Agoeng Noegroho, 2010: 17) mendefinisikan desa wisata sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ada dua komponen utama dalam desa wisata, yaitu: *pertama*, akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan *kedua*, atraksi, yakni seluruh kehidupan sehari-hari penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif.

Suatu desa dapat dikembangkan sebagai desa wisata apabila memiliki kriteria dan faktor-faktor pendukung sebagai berikut: *pertama*, memiliki potensi produk atau daya tarik unik dan khas yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Potensi-potensi tersebut dapat berupa lingkungan alam maupun kehidupan sosial budaya masyarakat. *Kedua*, memiliki dukungan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) lokal yang cukup dan memadai untuk mendukung pengelolaan desa wisata. *Ketiga*, faktor peluang akses terhadap akses pasar. Faktor ini memegang peran kunci, karena suatu desa yang telah memiliki kesiapan untuk dikembangkan sebagai desa wisata tidak ada artinya apabila tidak memiliki akses untuk berinteraksi dengan pasar atau wisatawan. *Keempat*, potensi SDM lokal yang mendukung peluang akses terhadap pasar wisatawan. *Kelima*, memiliki area untuk pengembangan fasilitas pendukung desa wisata, seperti: *home stay*, area pelayanan umum, area kesenian dan sebagainya (Dinas Pariwisata DIY, 2014: 26-29).

Berdasarkan tingkat perkembangannya, desa wisata dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut (Victoria br. Simanungkalit dkk. 2017: 20-21):

1. Desa wisata embrio adalah desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat untuk mengelolanya menjadi desa wisata.
2. Desa wisata berkembang, yakni desa wisata embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa secara swadaya, sudah mulai melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung.
3. Desa wisata maju merupakan desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinu dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelola, seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa wisata kategori ini telah mampu melakukan promosi dan pemasaran dengan baik.

Sementara itu, berdasarkan karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimilikinya, desa wisata dikelompokkan dalam empat kategori sebagai berikut (Dinas Pariwisata Provinsi DIY, 2014: 30):

1. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal sebagai daya tarik wisata utama.
2. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama seperti pegunungan, perkebunan dan pertanian, pesisir.
3. Desa wisata berbasis perpaduan keunikan sumber daya budaya dan alam sebagai daya tarik utama.
4. Desa wisata berbasis keunikan aktifitas ekonomi kreatif seperti industri kerajinan sebagai daya tarik wisata utama.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Penyadaran Masyarakat Akan Potensi Desa

Nglanggeran merupakan desa yang secara administratif terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Nglanggeran memiliki luas 762.099 ha dengan tata guna lahan sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, ladang dan pekarangan. Di Desa Nglanggeran terdapat gunung yang saat ini berkembang menjadi salah satu tujuan wisata. Menurut salah satu pengurus Pokdarwis, Bapak Sugeng Handoko, Gunung Nglanggeran terletak di Zona Pegunungan Selatan Jawa Tengah-Jawa Timur atau tepatnya di Subzona Pegunungan Baturagung dengan ketinggian 700 meter dari permukaan laut dan kemiringan lerengnya curam-terjal (>45%). Bentang alamnya memiliki keindahan dan secara geologi sangat unik dan bernilai ilmiah tinggi. Berdasarkan sejarah geologinya, Gunung Nglanggeran merupakan gunung api purba yang berumur tersier atau 0,6-70 juta tahun yang lalu. Material batuan penyusun Gunung Nglanggeran merupakan endapan vulkanik tua berjenis andesit (*old andesite formation*). Singkapan batuan vulkanik klastik yang

ditemukan di Gunung Nglanggeran kenampakannya sangat ideal. Oleh karena itu, satuan batuan yang ditemukan di gunung tersebut menjadi lokasi tipe dan diberi nama Formasi Geologi Nglanggeran (wawancara, tanggal 30 Agustus 2017).

Sebelum menjadi ekowisata, kawasan Gunung Api Purba seluas 48 ha dan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut termasuk kawasan yang gersang. Masyarakat sering mengambil batu dan menebang pohon dari area tersebut untuk dijual. Aktivitas tersebut berpotensi merusak lingkungan. Karang Taruna Desa Nglanggeran (Karang Taruna Bukit Putra Mandiri) menyadari bahwa apabila kondisi tersebut terus berlanjut, akan terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, Karang Taruna ingin mengubah kondisi kawasan Gunung Api Purba menjadi kawasan yang lebih menarik dan memberi keuntungan bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan. Kemudian dilakukan penelitian oleh peneliti dari UPN Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Gunung Kidul tentang potensi Gunung Api Purba. Hasilnya Gunung Api Purba merupakan gunung api yang pernah aktif jutaan tahun lalu, namun sekarang gunung tersebut dinyatakan sudah tidak aktif lagi. Gunung Api Purba berbentuk bongkahan batu andesit raksasa membentang sekitar 800 meter dan setinggi 300 meter ini ternyata menyimpan keindahan yang dapat dikembangkan.

Bersama sejumlah pemuda di tiga dusun di Nglanggeran, yakni Nglanggeran Kulon, Nglanggeran Wetan, dan Gunung Butak, Bapak Sugeng Handoko (saat ini pengurus Pokdarwis) merintis kegiatan ekowisata berbasis masyarakat. Dengan menerapkan konsep tersebut, tidak diharapkan adanya investasi dari pihak luar, sehingga keberlanjutan konservasi alam dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dapat dipertahankan. Menurut Bapak Sugeng, pengembangan konsep tersebut

mebutuhkan komitmen dari semua pihak desa dan waktu yang tidak sebentar. SDM yang berkompeten juga diperlukan agar mampu memanfaatkan potensi desa bagi kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Selain itu, faktor yang juga penting dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat adalah swadaya baik berupa tenaga maupun material dari semua pihak. Kebetulan, saat itu Bapak Sugeng menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Bukit Putra Mandiri di Desa Nglanggeran sehingga lebih mudah dalam mengorganisasi pemuda (wawancara, tanggal 30 Agustus 2017).

Berbagai kegiatan pelestarian lingkungan terus dilakukan oleh karang taruna. Atas dasar itulah, Pemerintah Desa Nglanggeran memercayakan pengelolaan lahan seluas 48 ha untuk dikelola Karang Taruna Bukit Putra Mandiri yang kemudian dituangkan dalam dalam SK Kepala Desa Nglanggeran No.05/KPTS/1999 tertanggal 12 Mei 1999. Selain itu, sosialisasi terus dilakukan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang potensi wisata kawasan tersebut.

Memberi kesadaran masyarakat memang bukan hal yang mudah. Sebagaimana dinyatakan Bapak Sugeng Handoko (wawancara, tanggal 30 Agustus 2017) bahwa bagi masyarakat yang tinggal turun temurun di Nglanggeran, kondisi alam Nglanggeran dianggap tidak menarik. Hal ini menyebabkan tingkat urbanisasi di Desa Nglanggeran sangat tinggi. Karena peluang kerja sedikit, pemuda desa itu memilih ke luar daerah bahkan ke luar negeri untuk mendapat penghasilan memadai. Persepsi itulah yang coba diubah oleh Karang Taruna Bukit Putra Mandiri. Dalam setiap pertemuan desa, perwakilan karang taruna selalu mensosialisasikan ide pengembangan desa wisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan budaya lokal dan menjaga kelestarian lingkungan alam.

Seiring berjalannya waktu, mulai tumbuh kesadaran untuk mengembangkan desanya. Setelah diperoleh kesepakatan

dari masyarakat, langkah selanjutnya adalah memilih potensi desa yang akan dikembangkan, meliputi: penggalan ide dan gagasan di kelompok-kelompok masyarakat, memusyawarahkan ke forum lebih tinggi, memilih kegiatan yang paling mendekati kondisi *existing* (SDM, potensi, isu yang berkembang), menentukan skala prioritas, menjadikan kesepakatan bersama, membuat perencanaan dan membagi peran dalam proses pengembangannya.

Berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat, potensi alam desa yang dikembangkan meliputi Gunung Api Purba, Embung Nglanggeran, dan Air Terjun Musiman. Panorama wisata yang ditawarkan Gunung Api Purba berupa *sunrise*, *sunset*, bulan dan bintang pada malam hari, panjat tebing yang menantang, dan keindahan alam berupa deretan pegunungan dan perkampungan penduduk yang menarik. Selain itu, di kawasan ini dijumpai fauna dan flora langka seperti tanaman tremas (tanaman obat yang hanya hidup di kawasan ekowisata Gunung Api Purba) dan kera ekor panjang.

Gunung Api Purba juga mempunyai beberapa kawasan yang bernilai sejarah seperti Gunung Kelir dengan bentuk kelir, diyakini sebagai tempat tinggal dari Ongko Wijoyo dan Punakawan, Tlogo Wungu dipercaya sebagai tempat pemandian bidadari, Sumber Air Comberan digunakan sebagai tempat pemujaan dan pertapaan orang zaman dahulu, Gunung Gedhe, Gunung Bongos, Gunung Blencong, Gunung Buchu, Tlogo Mardhido, Talang Kencono, dan Pamean Gadhung. Masing-masing kawasan tersebut menyimpan cerita sejarah yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

Satu lagi legenda unik dari Gunung Api Purba sebagai daya tarik wisata, yaitu Kampung Pitu. Menurut legenda yang dipercaya masyarakat, keluarga yang tinggal di puncak gunung itu harus berjumlah 7 kepala keluarga saja. Jika kepala keluarga yang tinggal di dusun ini kurang atau lebih maka akan terjadi hal-hal buruk yang tidak

diinginkan. Oleh karena itu, jika anak-anak mereka sudah berkeluarga maka keluarga baru tersebut harus meninggalkan Dusun Tlogo Mardhido.

Potensi alam kedua adalah embung. Embung atau telaga buatan dibangun di atas sultan *ground*. Embung diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X tanggal 19 Februari 2013. Embung berjarak sekitar 1,5 km arah tenggara dari Pendopo Kalisong dan pintu gerbang masuk Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran. Fungsi utama embung adalah mengairi Kebun Buah Nglanggeran dengan memanfaatkan sumber air hujan sekaligus suplai dari sumber mata air yang ada di kawasan Nglanggeran, yakni Sumber Air Tujuh. Embung Nglanggeran menawarkan wisata yang unik karena tidak berada pada daerah lembah seperti umumnya telaga lain. Embung dibangun di atas bukit berketinggian sekitar 500 mdpl, sehingga seolah kita menikmati suasana di atas awan.

Selain gunung dan embung, potensi wisata alam lain di Nglanggeran adalah Air Terjun Musiman (Talang Purba dan Air Terjun Kedung Kandang). Keunikan air terjun ini adalah berada di tengah terasiring sawah dan berbentuk tangga batuan vulkanik. Sedangkan di Air Terjun Kedung Kandang terdapat tiga kedung dan enam tingkatan air terjun. Kedung kandang adalah kedung paling bawah dan paling besar, di atasnya terdapat Kedung Temanten dan Kedung Keris.

Nglanggeran juga menyimpan potensi wisata budaya yang dapat dikembangkan seperti wiwitan, kenduri, tayuban, atraksi kesenian jathilan, membatik topeng, karawitan, dan rasulan. Rasulan atau bersih desa merupakan syukuran atas berhasilnya panen. Acara ini biasanya dilaksanakan di bulan jawa, ruwah. Selain itu, tradisi masyarakat seperti bertani, membajak sawah, menangkap ikan di sungai, dan memasak kuliner khas masyarakat lokal juga dapat dijadikan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Nglanggeran.

Tahun 2009, Nglanggeran resmi menjadi

desa wisata. Dengan visi menjadikan Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran menjadi kawasan wisata unggulan berwawasan lingkungan berbasis masyarakat, pengelola desa wisata terus berupaya mengajak masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pariwisata. Sedangkan misi dari pengelolaan desa wisata Nglanggeran meliputi: a) meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba; b) membangun dan meningkatkan kesadaran peduli lingkungan; c) menggalang kemitraan dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam masalah kepariwisataan dan aktivis peduli lingkungan; d) melindungi lingkungan di Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba, baik kebudayaan, flora, fauna dan juga keunikan batumannya; e) melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba; f) melakukan promosi secara efektif dan intensif; dan g) meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Gunung Kidul dan Provinsi DIY.

Pengkapasitasan Masyarakat

Setelah masyarakat menyadari potensi desanya, maka strategi pemberdayaan selanjutnya adalah pengkapasitasan masyarakat. Pengkapasitasan meliputi peningkatan kapasitas manusia, organisasi, dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dilakukan melalui pemberian ketrampilan dan pengetahuan seputar manajemen desa wisata. Dalam hal ini, peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah harus mengajak, memotivasi, dan mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan desanya sehingga kesejahteraan masyarakatnya meningkat tanpa merusak kelestarian lingkungan dan adat budaya setempat.

Pengkapasitasan manusia dimulai dari menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaku wisata. Para pelaku desa wisata banyak mengikuti pelatihan seputar pengelolaan desa wisata yang

diselenggarakan berbagai pihak. Misalnya, pada bulan Juli tahun 2009, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (sekarang Dinas Pariwisata) Gunung Kidul bekerja sama dengan Karang Taruna Bukit Putra Mandiri menyelenggarakan pelatihan panjat tebing bertempat di Pendopo Joglo Kalisong dengan mengundang Federasi Panjat Tebing Indonesia (FTPI) cabang Gunung Kidul sebagai instruktur. Kegiatan pelatihan bertujuan membekali peserta tentang teknik panjat tebing serta pengenalan alat dan cara penggunaannya sesuai standar keamanan pemanjatan. Tidak hanya Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata juga memfasilitasi sertifikasi pemandu. Tahun 2016, sebanyak 52 orang pemandu mengikuti sertifikasi pemandu ekowisata yang merupakan program dari Kementerian Pariwisata berlokasi di Goa Jomblang.

Selain memfasilitasi sertifikasi pemandu, Kementerian Pariwisata memberikan bantuan PNPM Pariwisata kepada Desa Wisata Nglanggeran melalui Pokdarwis. Menurut Bapak Mursidi, Desa Nglanggeran mendapatkan program PNPM Pariwisata dua tahap, yaitu tahun 2011 dan tahun 2012. Adapun program yang dilaksanakan di tahun pertama (2011) antara lain: pelatihan pengelolaan *home stay*, pelatihan penataan pedagang, pembuatan warung relokasi pedagang, dan pembuatan arena *flying fox*. Selanjutnya tahap kedua (2012) digunakan untuk pelatihan pemandu *outbond*, pelatihan kuliner, pelatihan manajemen objek daya tarik wisata, pelatihan kesenian tradisional dan pengadaan seragam kesenian, serta pembuatan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) berstandar wisatawan mancanegara (wawancara, tanggal 31 Agustus 2018). Program-program tersebut merupakan hasil dari rebug warga sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dimiliki. Diharapkan dengan adanya program ini akan memperkuat

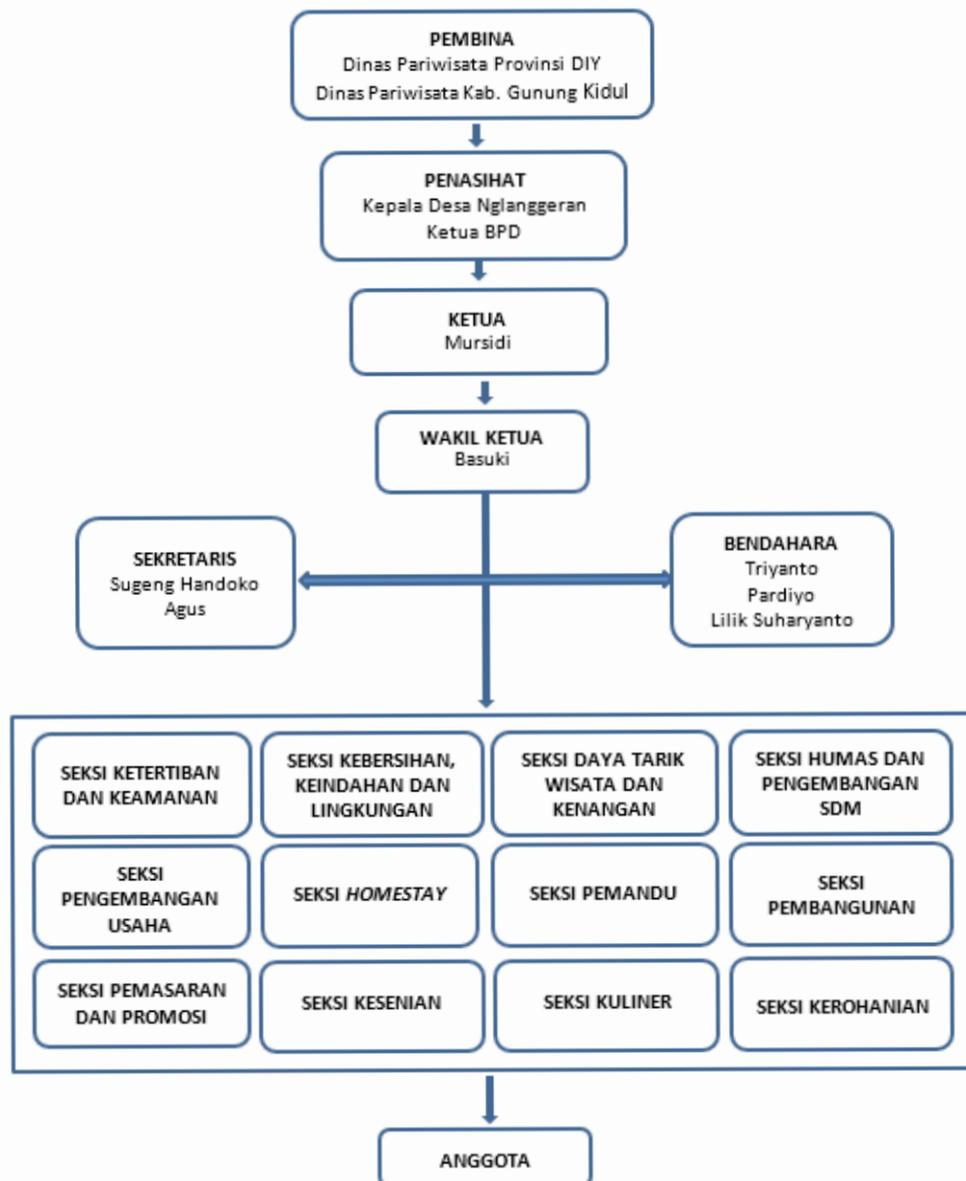
daya tarik wisata yang sudah terbentuk sebelumnya.

Dalam perkembangannya, Dinas Pariwisata Gunung Kidul terus melakukan pendampingan bagi pengelola Desa Wisata Nglanggeran. Promosi *family tour* terus digalakkan. Akses untuk dikenal secara global semakin terbuka lebar. Hasilnya Nglanggeran menjadi destinasi wisata baik domestik maupun mancanegara. Semakin dikenalnya Nglanggeran sampai ke mancanegara, mendorong pengelola desa wisata untuk lebih meningkatkan kemampuan bahasa asing. Beberapa mahasiswa dari Manajemen Kajian Pariwisata UGM rutin datang ke Nglanggeran untuk melatih bahasa Inggris para pengelola desa wisata (wawancara, dengan pengurus Pokdarwis, Triyanto tanggal 31 Agustus 2017).

Seiring dengan semakin tingginya jumlah wisatawan yang datang ke Nglanggeran, maka Karang Taruna dan Pemerintah Desa berinisiatif untuk membentuk kelompok pengelola wisata. Kelompok tersebut diberi nama Badan Pengelola Desa Wisata (BPDW) Nglanggeran. BPDW melibatkan seluruh komponen masyarakat seperti PKK, kelompok tani, Pemerintah Desa dan Karang Taruna. BPDW Nglanggeran terus membenahi dan menata lokasi wisata dengan membangun jalur pendakian, fasilitas MCK, dan gubuk-gubuk peristirahatan pendakian. Selain penataan fisik, juga diperlukan pengembangan konsep gerakan sadar wisata untuk mendukung terciptanya iklim kondusif di desa wisata. Gerakan sadar wisata merupakan konsep yang mengembangkan partisipasi dan dukungan para pemangku kepentingan dalam mendorong iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya wisata di suatu wilayah.⁶

Tahun 2013, BPDW ditunjuk sebagai organisasi yang secara resmi berhak mengelola 48 hektar kawasan konservasi Gunung Api Purba sekaligus menggunakannya sebagai

⁶ Apa itu Pokdarwis? <https://travel.kompas.com/read/2017/10/17/153900727/apa-itu-pokdarwis->, diakses 16 Maret 2018.



Bagan 1. Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata Desa Nglanggeran Tahun 2016-2021
Sumber: Mursidi, Ketua Kelompok Sadar Wisata, wawancara, 30 Agustus 2017

kawasan wisata dengan nama organisasi baru, yaitu Pokdarwis Desa Wisata Nglanggeran. Keberadaan Pokdarwis merupakan cermin pengkapasitasan organisasi dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya. Dalam hal ini, Pokdarwis berperan sebagai wadah organisasi lokal. Pokdarwis harus mampu meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata sekaligus meningkatkan nilai manfaat wisata bagi kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, jumlah pengurus inti dan anggota Pokdarwis tercatat sebanyak 154 orang. Dalam 1 minggu, satu orang akan bekerja piket menjadi pemandu wisata, petugas parkir atau menjaga kebersihan lingkungan kawasan selama 4 hari. Adapun susunan kepengurusan Pokdarwis akan ditunjukkan dalam Bagan 1.

Struktur organisasi, tata kerja, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan program kerja Pokdarwis ditetapkan melalui musyawarah anggota. Selain itu, Pokdarwis menyusun peraturan usaha bersama sesuai kesepakatan masyarakat pelaku wisata yang harus dipatuhi oleh

semua pihak. Penyusunan AD/ART dan peraturan usaha bersama mencerminkan pengkapasitasan sistem nilai dalam konsep pemberdayaan.

Seiring perkembangan Desa Wisata Nglanggeran, dukungan dari pemerintah daerah semakin meningkat. Pendampingan terus dilakukan baik pendampingan terhadap pokdarwis maupun kelompok-kelompok masyarakat berkegiatan ekonomi produktif yang mendukung desa wisata. Setiap kelompok mendapatkan pendampingan dari pihak terkait. Kelompok *pertama* adalah penyedia kuliner. Penyedia kuliner di Desa Wisata Nglanggeran dikelola oleh PKK yang tergabung dalam kelompok Purba Rasa. Adapun ketua kelompok penyedia kuliner adalah Ibu Surini dengan anggota berjumlah 55 orang. Banyak kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk peningkatan kapasitas SDM kelompok kuliner ini. Standar pelayanan pun disepakati masing-masing kelompok sehingga sistem kontrol dilakukan oleh anggota sendiri dan juga dari Pokdarwis Nglanggeran.

Kedua adalah kelompok *home stay* Purba Wisma yang menjadi tempat menginap bagi wisatawan di Desa Wisata Nglanggeran. Saat ini terdapat 80 *home stay* dengan berbagai kondisi yang menjadi keunikan dan keberagaman masyarakat. Penyesuaian pemilik *home stay* dan tamu yang akan menginap merupakan tugas dari Pokdarwis untuk mengaturnya. Interaksi antara wisatawan dengan pemilik *home stay* adalah syarat wajib setelah kebersihan rumah dan MCK yang dimiliki.

Ketiga adalah Kelompok Tani Kumpul Makaryo yang diketuai oleh Bapak Hadi Purnomo. Kelompok tani tersebar di lima dusun di Desa Nglanggeran. Saat ini sebanyak 100 anggota aktif melakukan kegiatan pertanian yang mendukung desa wisata. *Keempat*, kelompok pengrajin yang terdiri dari tiga kelompok pengrajin. Adapun kelompok ini ada di Dusun Nglanggeran Kulon, Nglanggeran Wetan, dan Gunungbatak.

Kelima, kelompok pedagang yang memiliki anggota 21 orang. Kelompok ini ada di sekitar kawasan ekowisata Gunung Api Purba. *Keenam*, Kelompok Ternak Purbaya dengan ketua kelompok Bapak Pardiya. Lokasi ternaknya ada di Nglanggeran Kulon, Nglanggeran Wetan, dan Gunung Butak. *Ketujuh* adalah kelompok pengelola kakao yang diketuai Bapak Hadi Purwanto. Jumlah anggota 15 orang.

Kedelapan, kelompok TKI Purna dengan Bapak Triyana sebagai ketua. Kelompok ini beranggotakan 50 orang. Pada tahun 2014 Desa Nglanggeran resmi menjadi Sentra Usaha TKI Purna karena menurut kajian dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melalui Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Yogyakarta, para TKI Purna di desa ini sangat potensial dan kreatif dalam berwirausaha dengan mendayagunakan potensi daerahnya. Bentuk konkrit pemberdayaan dilakukan melalui program edukasi keuangan dan edukasi kewirausahaan bagi para TKI Purna dan keluarganya. Dengan kegiatan itu diharapkan semakin banyak daerah lain yang terinspirasi dan termotivasi untuk mengembangkan ekonomi produktif sebagai sumber penghasilan berkelanjutan di daerah asal.

Tahun 2017, Pokdarwis bekerja sama dengan Tim Putri Kedaton pimpinan Lastiyani Warih Wulandari menyelenggarakan pelatihan terapis spa profesional untuk mendukung kegiatan spa di Desa Wisata Nglanggeran. Sebanyak 20 perempuan dari kelompok Purba Ayu Spa dilatih oleh Tim Putri Kedaton. Para perempuan yang akan menjadi terapis ini dibekali metode pijat yang benar mulai dari *foot massage*, *hand massage*, hingga *back massage*. Tidak hanya itu, kelompok ini juga mendapat materi pembuatan produk lulur dan masker spa serta mempelajari penyiapan makanan dan minuman spa.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

juga ikut terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. Bentuk pendampingan masyarakat meliputi pendampingan pembuatan rencana pengembangan desa wisata oleh *Indonesia Ecotourism Network* (Indecon), pelatihan bahasa asing bagi pelaku wisata khususnya pemandu wisata oleh Komunitas STORM, dan pelatihan pelatihan kapasitas pasca gempa oleh *International Organization for Migration* (IOM). Pada prinsipnya, semua kegiatan peningkatan kapasitas diselenggarakan dengan mengacu pada “sapta pesona” (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan).

Pemberian Daya

Pada tahap ini, masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Tahun 2012, Pertamina memberikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) senilai Rp765.084.500 kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kumpul Makaryo untuk mengembangkan agrowisata di Nglanggeran dengan konsep Sentra Pemberdayaan Tani (SPT).

SPT Nglanggeran merupakan konsep pertama SPT melalui pembuatan kebun buah durian dan kelengkeng dengan jumlah tanaman 3.100 pohon yang terdiri atas 2.800 pohon durian monthong dan chanee, dan 300 pohon kelengkeng. Kebun buah berdiri di atas tanah seluas 20 ha. 11,5 ha merupakan tanah Sultan dan 8,5 ha merupakan tanah warga. Kebun buah ini dikelola oleh Kelompok Tani Kencono Mukti yang terdiri dari 80 orang petani dari Desa Nglanggeran.

Program pengembangan agrowisata diawali dengan pembangunan waduk kecil yang biasa disebut embung di atas bukit Nglanggeran. Embung digunakan sebagai tempat penampungan air hujan untuk mengairi kebun buah di sekitarnya pada musim kemarau. Embung dapat menampung air hingga mencapai 12.000 meter kubik. Di sekitar lokasi embung ditanami bibit durian dan kelengkeng.

Dalam perkembangannya, Pertamina bekerja sama dengan Yayasan Obor Tani terus melakukan pendampingan kepada petani dalam pengembangan agrowisata. Dampaknya, Agrowisata Patra Nglanggeran berhasil menarik perhatian wisatawan yang datang ke Desa Wisata Nglanggeran. Tidak hanya menikmati keindahan alam, wisatawan juga dapat menikmati buah kelengkeng dan durian di atas bukit.

Dinas Pariwisata Provinsi DIY juga mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran melalui pemberian bantuan hibah berupa 79 unit kloset duduk, lantai keramik, tempat penampungan air, dan pipa penyambungan air yang diserahkan kepada 79 pemilik *home stay* pada akhir tahun 2014 (wawancara, dengan Mursidi tanggal 31 Agustus 2018). Saat ini, rata-rata di setiap *home stay* terdapat dua MCK, yakni model jongkok dan model duduk untuk kebutuhan wisatawan mancanegara. Diharapkan dari bantuan ini dapat memenuhi kebutuhan wisatawan terutama wisatawan mancanegara yang akan menginap di *home stay* tersebut.

Tahun 2015, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan Universitas Gadjah Mada mendirikan Taman Teknologi Pertanian (TTP) di atas lahan seluas 4.600 meter persegi. Lokasi TTP berada di kawasan Agrowisata Patra. Tujuan didirikannya TTP sebagai pusat diseminasi, pusat pengolahan kakao dan susu kambing etawa (pabrik mini), inovasi hidroponik sayuran, *screen field* bunga krisan, dan inovasi teknologi lain khususnya pembibitan sayuran dan buah-buahan.

Perlu diketahui bahwa di Nglanggeran terdapat dua tempat pengolahan coklat. Selain TTP, ada juga Griya Cokelat. Griya Cokelat merupakan *home industry* dengan alat sederhana untuk memproduksi coklat, sedangkan TTP merupakan industri dengan skala besar. Kedua usaha ini berjalan sinergi

(Sugeng Handoko, Sekretaris Pokdarwis, wawancara, 31 Agustus 2017).

Griya Cokelat Nglanggeran merupakan salah satu inovasi yang digerakkan oleh masyarakat lokal dalam rangka mengembangkan potensi kakao di Nglanggeran. Desa Nglanggeran merupakan salah satu desa penghasil kakao terbesar di Gunung Kidul dengan luas lahan 101 ha. Hal ini menarik perhatian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (BPTBA), Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gunung Kidul untuk bekerja sama mengembangkan dan membantu budidaya kakao hingga pengolahan pascapanen.

Sinergi beberapa *stakeholders* tersebut kemudian memberikan bantuan sarana dan prasarana berupa peralatan dan pembangunan rumah produksi atau *showroom* Griya Cokelat Nglanggeran. Kegiatan yang ada di Griya Cokelat Nglanggeran meliputi pengolahan buah kakao menjadi bubuk coklat hingga produk yang siap dimakan dan pelatihan pembuatan dodol coklat dan pembuatan keripik pisang salut coklat yang terintegrasi dalam paket wisata Gunung Api Purba. Produksi kakao kering 120 kg bisa menghasilkan 40 kg bubuk coklat. Sementara produk yang dihasilkan berupa 15 kg lemak coklat, 4.000 kemasan *chocomix*, 400 *pack* pisang coklat, dan 300 *pack* dodol coklat dengan berbagai varian.⁷

Kepala BPTBA LIPI, Hardi Julendra menyatakan bahwa Nglanggeran merupakan desa percontohan untuk mengelola ekonomi lokal dalam bentuk usaha berbasis komunitas. Oleh karena itu, strategi pengembangan produksi kakao di Nglanggeran merupakan perpaduan antara potensi sektor agro dengan berbagai komoditas yang ada, terutama Gunung Api Purba yang sangat potensial sebagai

komoditas pariwisata yang dikemas dalam pola agrowisata.⁸

Pada awalnya, TTP direncanakan menjadi pusat pengembangan hilirisasi teknologi yang dijalankan oleh lima kelompok, yaitu pengembangan berbasis padi dan sapi di Padukuhan Nglanggeran Wetan (kelompok Mugodadi) dan Padukuhan Doga (kelompok Margodadi), pengembangan berbasis kambing dan kakao di Padukuhan Gunung Butak (Ngudi Makmur) dan Padukuhan Karang Sari, sedangkan untuk pengolahan dan pemasaran hasil di Padukuhan Nglanggeran Kulon. Namun dalam praktiknya, masing-masing padukuhan juga mengembangkan inovasi teknologi integrasi kambing dan kakao.

Luasan tanaman kakao masyarakat setiap bulannya mencapai 3-5 ton di mana 30 persen dari produksi kakao diolah di TTP Nglanggeran. Masih minimnya produksi selain karena mesin yang terbatas, juga pemilihan biji kakao kualitas A yang akan digunakan untuk memproduksi berbagai olahan coklat. Adapun produk-produk yang dihasilkan TTP diantaranya, coklat instan, susu kambing etawa, susu kambing coklat, dan beberapa jenis permen coklat lainnya. Belum lama ini merk produk coklat diberi nama baru yakni SINcho (*Science Innovation Network chocolate*). Setelah berjalan kurang lebih tiga tahun, TTP diserahkan kembali ke Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

Menurut penulis, TTP lebih pada program pemerintah di desa wisata yang sedang berkembang. Tujuan awalnya untuk memberdayakan masyarakat. Namun dalam praktiknya, skala usaha TTP besar dan masyarakat dijadikan karyawan di posisi tertentu. Akibatnya, TTP tidak bisa menampung masyarakat dalam jumlah besar dan inovasi yang dikembangkan juga tidak didasarkan pada potensi dan kebutuhan masyarakat lokal. TTP tidak bersifat

⁷ Inilah Produk Griya Cokelat Nglanggeran, <http://gunungapipurba.com/posts/detail/inilah-produk-griya-cokelat-nglanggeran>, diakses 16 Maret 2018.

⁸ “Diresmikan, Griya Cokelat Hasil Kerjasama LIPI dengan BI dan Kabupaten Gunung Kidul,” <http://lipi.go.id/siaranpress/diresmikan-griya-cokelat-hasil-kerjasama-lipi-dengan-bi-dan-kabupaten-Gunung-Kidul/17088>, diakses 16 Februari 2018.

memberdayakan masyarakat. Berbeda dengan Griya Coklat. Griya Coklat dikelola langsung masyarakat sehingga keuntungan yang diperoleh kembali ke masyarakat.

Pokdarwis Nglanggeran terus berinovasi untuk mengembangkan desanya. Tahun 2016 dibangun Nglanggeran *Mart*, yaitu toko produk lokal masyarakat Desa Nglanggeran. Nglanggeran *Mart* menjual souvenir dan produk olahan ibu-ibu PKK Desa Nglanggeran seperti keripik singkong, *brownies* singkong, dan dodol kakao. Pokdarwis juga memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan bunga 1,5% yang diangsur selama 35 hari. Besarnya bunga merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat dan digunakan untuk penambahan pemupukan modal. Pada awalnya, besarnya pinjaman antara Rp300-500 ribu. Dengan berjalannya kegiatan ini dinilai efektif membantu masyarakat dalam peningkatan usaha wisata seperti memperbaiki *home stay* atau membuat MCK. Karena itu, besarnya waktu pinjaman meningkat menjadi Rp2,5-3juta. Hal ini juga dipengaruhi perputaran uang yang ada di Pokdarwis. Kegiatan simpan pinjam ini dilakukan bersamaan dengan pertemuan warga setiap malam Selasa Kliwon. Selain sebagai wadah kegiatan simpan pinjam, pertemuan malam Selasa Kliwon sebenarnya merupakan wadah untuk melakukan monitoring dan evaluasi Desa Wisata Nglanggeran.

Seiring berjalannya waktu, konsep desa wisata yang tetap mempertahankan masyarakat. Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran ternyata membawa berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat Nglanggeran yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani tidak perlu berganti profesi karena pertanian juga diintegrasikan sebagai salah satu bagian dari wisata. Para pengelola desa wisata berusaha menampilkan budaya lokal yang dikemas dalam sebuah paket wisata seperti *home stay*, *outbond*, makrab, *camping*, Puncak Kampung Pitu, *sunset* dan *sunrise*, dan *live in*.

Paket *live in* paling banyak diminati

wisatawan karena wisatawan bisa berinteraksi langsung dengan penduduk dan belajar budaya masyarakat Desa Nglanggeran seperti menanam padi dan membajak sawah, membuat kreasi kerajinan dari janur, belajar tari tradisional (Jathilan dan Reog), membuat topeng, ikut kenduri, menangkap dan melepas ikan di sungai, belajar memasak makanan khas Desa Nglanggeran, dan budidaya kakao. Pilihan wisata yang ditawarkan ternyata Pokdarwis berhasil menarik perhatian wisatawan baik

Tabel 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2012-2017

Tahun	Kunjungan Wisatawan		Total
	Domestik	Mancanegara	
2012	27675	200	27875
2013	85424	234	85658
2014	324827	476	325303
2015	255388	529	255917
2016	171306	1557	172863
2017	149241	1794	151035

Sumber: Sugeng Handoko, Pengurus Pokdarwis, wawancara, 1 September 2017.

domestik maupun mancanegara. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Nglanggeran seperti ditunjukkan Tabel 2 berikut.

Selama kurun waktu 6 tahun, terus terjadi kenaikan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Desa Wisata Nglanggeran. Bahkan pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 325.303 orang. Angka ini meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya 2013 yang hanya 85.658 orang. Fenomena ini menunjukkan bahwa wisata minat khusus semakin diminati wisatawan. Namun demikian, perkembangan Desa Wisata Nglanggeran yang sangat pesat menyisakan dampak buruk bagi lingkungan. Kondisi alam di sekitar objek wisata Nglanggeran rusak. Karena itu Pokdarwis berupaya memperbaiki kondisi Nglanggeran dengan menekan jumlah wisatawan yang berkunjung demi keberlangsungan Desa Wisata Nglanggeran.

Salah satunya dengan menaikkan harga tiket masuk dari Rp7.000 menjadi Rp15.000. Hasilnya tahun 2017 jumlah wisatawan mengalami penurunan menjadi 151.035 orang dari 172.863 orang di tahun 2016. Penurunan jumlah wisawatan tidak menurunkan omzet Desa Wisata Nglanggeran. Tahun 2018,

Tabel 3. Omzet Desa Wisata Nglanggeran Tahun 2012-2017

Tahun	Omzet (rupiah)	Kas Desa dan BUMDes (rupiah)	Retribusi Pemkab Gunung Kidul (rupiah)
2012	81.225.000	2.400.000	-
2013	424.690.000	3.600.00	-
2014	1.422.915.000	7.200.000	196.400.000
2015	1.541.990.000	8.400.000	369.200.000
2016	1.081.710.500	12.000.000	345.726.000
2017	1.963.455.000	71.030.500	304.068.000

Sumber: Sugeng Handoko, Pengurus Pokdarwis, wawancara, 1 September 2017.

omzet Desa Nglanggeran tetap naik sebesar Rp1.963.455.000 dari Rp1.081.710.500 pada tahun 2017. Uraian lebih rinci akan dijelaskan dalam Tabel 3 berikut.

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, pendapatan Desa Wisata Nglanggeran berupa tiket masuk wisatawan terdistribusi ke beberapa tempat. Tiket seharga Rp7.000 per lembar didistribusikan ke Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp2.000, Jasa Raharja Rp500, Pemerintah Desa Rp2.000, sedangkan sisanya sebesar Rp2.500 masuk ke kas Pokdarwis untuk kegiatan operasional dan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran.

Dampak lain dari pengembangan desa wisata adalah penurunan tingkat migrasi karena kegiatan pariwisata mendorong munculnya berbagai lapangan kerja bagi masyarakat setempat seperti pemandu wisata, usaha *home stay*, warung makan, toko oleh-

oleh, dan petugas parkir. Demikian juga terjadi transformasi kultural mata pencaharian masyarakat dari pertanian ke pariwisata akibat berkembangnya desa wisata. Namun demikian, transformasi mata pencaharian tersebut tidak terjadi pada seluruh warga Nglanggeran. Kepala Desa Nglanggeran, Bapak Senen mengatakan bahwa warga yang mengelola *home stay* dan jasa pariwisata lebih banyak berasal dari tiga dusun yang berdekatan dengan objek wisata, yakni Dusun Nglanggeran Kulon, Nglanggeran Wetan, dan Gunung Butak. Sedangkan di dua dusun lain, yakni Dusun Karang Sari dan Dusun Doga, kondisi tersebut tidak ditemukan (Senen, Kepala Desa Nglanggeran, wawancara, 2 September 2017).

Transformasi mata pencaharian masyarakat yang tidak merata menimbulkan kesenjangan ekonomi di Desa Nglanggeran. Masyarakat di sekitar objek wisata mempunyai akses yang lebih besar dalam usaha wisata dibandingkan dengan masyarakat yang relatif jauh dari objek wisata. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh juga berbeda. Dengan demikian, semakin tinggi keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata, maka peluang masyarakat untuk mengambil manfaat ekonomi dari hasil kegiatan desa wisata cenderung semakin tinggi.

Penutup Simpulan

Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi oleh Karang Taruna Putra Bukit Mandiri untuk menyadarkan masyarakat akan potensi desa Desa Nglanggeran. Akhirnya masyarakat sepakat menjadikan Nglanggeran sebagai desa wisata. Masyarakat kemudian menentukan potensi Desa Nglanggeran yang akan dikembangkan sebagai daya tarik wisata meliputi wisata

alam, wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata edukasi.

Setelah tumbuh kesadaran masyarakat akan potensi desa, kemudian dilakukan pengkapasitasan. Pengkapasitasan pengelola desa wisata dilakukan melalui pelatihan seputar pengelolaan desa wisata. Sebagai bentuk dukungan bagi pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Dinas Pariwisata dan Kementerian Pariwisata aktif memberikan pelatihan dan pendampingan. Begitu juga dengan BUMN, pihak swasta maupun LSM. Mereka sangat mengapresiasi ide pengembangan desa wisata. Untuk memudahkan koordinasi dan pengelolaan, para pengelola desa wisata disatukan dalam wadah organisasi lokal yang disebut Pokdarwis Nglanggeran. Pokdarwis merupakan wujud dari pengkapasitasan organisasi. Pokdarwis kemudian menyusun peraturan usaha bersama (AD dan ART) untuk mengatur sistem kerja organisasi dan sistem administrasi berdasarkan musyawarah anggota.

Masyarakat yang telah mempunyai kapasitas kemudian diberi daya untuk mencapai kemandirian. Dari segi fisik, Desa Nglanggeran banyak mendapat bantuan dana pembangunan sarana pendukung wisata dari berbagai pihak. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menganggarkan dana pembangunan sarana pendukung wisata dari APBD. Dinas Pariwisata Provinsi DIY memberikan hibah untuk pengembangan *home stay*. Kemudian untuk pengembangan objek wisata, Pertamina memberikan dana CSR kepada kelompok tani untuk mengembangkan wisata agro. Lembaga penelitian, pihak perbankan, perguruan tinggi dan dinas terkait juga bersinergi untuk pengembangan budidaya kakao mengingat Desa Nglanggeran merupakan salah satu desa penghasil kakao terbesar di Gunung Kidul.

Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran membawa berbagai dampak. Tingkat migrasi menurun karena kegiatan pariwisata mendorong munculnya berbagai

lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Bahkan terjadi transformasi kultural mata pencaharian masyarakat dari pertanian ke pariwisata. Namun demikian, transformasi mata pencaharian tersebut tidak terjadi pada seluruh warga Nglanggeran. Akibatnya muncul kesenjangan ekonomi masyarakat di Desa Nglanggeran. Selain itu, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Nglanggeran setiap tahunnya akan meningkatkan PAD Gunung Kidul melalui retribusi tiket masuk wisatawan.

Saran

Selama ini ada sebagian masyarakat di desa wisata yang hanya menjadi *multiplier* efek dari adanya kegiatan wisata. Karena itu, pengelola desa wisata diharapkan mampu merangkul semua elemen masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa wisata dapat merata. Selain itu, perlu dilakukan regenerasi pengelola desa wisata agar seluruh masyarakat kompeten dalam berorganisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Chusmeru dan Agoeng Noegroho. (2010). "Potensi Ketengger Sebagai Desa Wisata di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas". *Analisis Pariwisata* Vol. 10, No. 1, 2010: 16-23.
- Johnson, Peter A. (2010). "Realizing Rural Community Based Tourism Development: Prospects for Social-Economy Enterprises." *Journal of Rural and Community Development* 5, 1/2 (2010): 150-162.
- Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, dan M. Baiquni. (2013). "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali". *Kawistara*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2013: 129-139.
- Nurhidayati, Sri Endah dan Chafid Fandeli. (2012). "Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kota Batu, Jawa Timur." *Jejaring Administrasi Publik*. Th IV. Nomor 1, Januari-Juni 2012: 36-46.

Pookaiyaudom, Gulapish. (2013). "The Integrated Learning of Community-Based in Thailand." *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 106 (2013): 2890-2898.

Wearing, S.L. and Mc Donald. (2002). "The Development of Community Based Tourism: Re-Thinking The Relationship Between Tour Operators and Development Agents As Intermediaries in Rural and Isolated Area Communities." *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 10, No. 3, 2002.

Buku

Dinas Pariwisata DIY. (2014). Kajian Pengembangan Desa Wisata di DIY. *Laporan Akhir*. DIY: Dinas Pariwisata DIY.

Hadiwijoyo. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ife, Jim. (1995). *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Addison Wesley Longman.

O.S. Prijono, O.S. & A.M.W. Pranarka. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.

Pantin, D. and Francis, J. (2005). *Community Based Sustainable Tourism*. UK: UWI-SEDU.

Tri Winarni. (1998). *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Adita Media.

Victoria br. Simanungkalit, dkk. (2017). *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau*. Jakarta: Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Artikel

Hausler, N. (2005). *Definition of Community Based Tourism*. Tourism Forum International at the Reisepavillon. Hanover 6 Pebruari 2005.

Laporan Penelitian

Hastuti, Suhadi Purwantara, dan Nurul Khotimah. "Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Lereng Merapi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta". Laporan Penelitian. <http://lppm.uny.ac.id/sites/lppm.uny.ac.id/files/abstrak%20lepas%20desa%20wisata.pdf>, diakses 27 April 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.

Internet

Apa itu Pokdarwis? <https://travel.kompas.com/read/2017/10/17/153900727/apa-itu-pokdarwis->, diakses 16 Maret 2018.

Desa Wisata Nglanggeran Terbaik ASEAN 2017, <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/21/242838401/desa-wisata-nglanggeran-terbaik-asean-2017>, diakses 27 Februari 2017.

Diresmikan, Griya Cokelat Hasil Kerjasama LIPI dengan BI dan Kabupaten Gunung Kidul, <http://lipi.go.id/siaranpress/diresmikan-griya-cokelat-hasil-kerjasama-lipi-dengan-bi-dan-kabupaten-gunung-kidul/17088>, diakses 16 Maret 2018.

Inilah Produk Griya Cokelat Nglanggeran, <http://gunungapipurba.com/posts/detail/inilah-produk-griya-cokelat-nglanggeran>, diakses 16 Maret 2018.

Lebih baik Pertumbuhan Desa Wisata Daripada Mal, <http://www.pikiran-rakyat.com/wisata/2016/01/04/355728/lebih-baik-pertumbuhan-desa-wisata-daripada-mal>, diakses 27 Februari 2017.

Pengangguran Turun 530.000, Menaker: Pariwisata Serap Tenaga Kerja, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3340085/pengangguran-turun-530000-orang-menaker-pariwisata-serap-tenaga-kerja>, diakses 20 Februari 2017.

Tantangan Pengembangan Pariwisata, <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/02/03/01yjcui1-tantangan-pengembangan-pariwisata>, diakses 7 Februari 2017.